



**BUPATI KULON PROGO**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 332/C/2024

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024;
- b. bahwa agar penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berjalan lancar dan mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2024;
10. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 364/C/2023 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah berjalan optimal maka didukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 13 Juni 2024  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

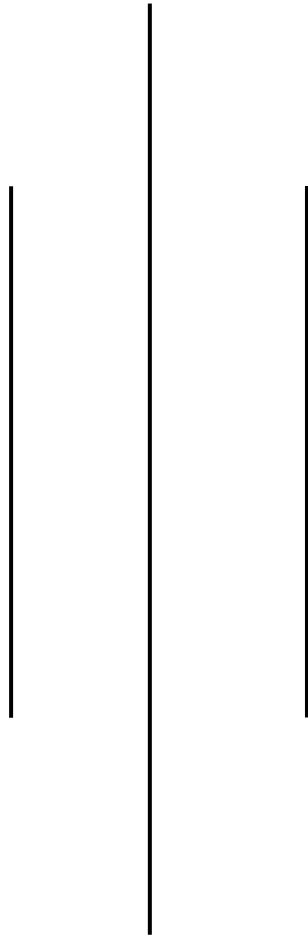
SRIE NURKYATSIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 332/C/2024  
TENTANG  
RENCANA AKSI REFORMASI  
BIROKRASI PEMERINTAH  
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN  
2024



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penyusunan rencana aksi sebagai tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* RB Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Secara umum penyusunan rencana aksi terdapat dua tipe yaitu mandat instansi yang dirumuskan sesuai tupoksi instansi, dan inisiatif instansi yang merupakan inovasi dari instansi terkait. Masing-masing dari rencana aksi disusun oleh setiap unit kerja. Unit kerja memberikan inisiatif rencana aksi. Setelah proses penyusunan masing-masing rencana aksi kemudian dilakukan proses validasi.

Rencana Aksi merupakan *output* dari Tim Pengelola RB General dan Tim Pengelola RB Tematik. Rencana Aksi RB General dan Tematik dapat beririsan, sehingga dalam proses perencanaan RB mikro, perlu dikoordinasikan secara komprehensif oleh Sekretariat Tim RB. Penyusunan rencana aksi harus terukur dan memiliki dampak langsung terhadap capaian Kegiatan Utama. Setiap rencana aksi mencantumkan target triwulanan berupa akumulasi dari triwulan-triwulanan sebelumnya yang perlu didukung dengan pembiayaan di masing-masing Perangkat Daerah.

Rencana Aksi disusun pada level Pusat dan Unit Kerja. Rencana Aksi RB Unit Kerja disusun oleh Pengelola RB General dan Tematik di level unit kerja. Rencana Aksi Unit Kerja terdiri dari penjabaran atas Rencana Aksi level pusat dan inisiatif unit kerja jika diperlukan. Jika unit kerja memiliki Rencana Aksi di luar mandat level pusat, maka inisiatif tersebut harus melalui proses validasi level pusat terlebih dulu sebelum dimasukkan sebagai Rencana Aksi RB Unit Kerja.

#### B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan ditetapkannya rencana aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

1. Sebagai tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* RB Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
2. Sebagai panduan dan mekanisme terstruktur dalam pelaksanaan reformasi lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
3. Mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN, efektif dan efisien serta profesional melayani

## BAB II

### PENETAPAN RENCANA AKSI

#### A. Rencana Aksi General

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Capaian 2023	Target 2024	Rencana Aksi	Output		Target				Jumlah Anggaran	PD	
					Satuan	Indikator output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Penyusun Renaksi	Pelaksana
<b>SS.1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>													
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	5	5	Monitoring Evaluasi Penerapan Sistem Kerja	dokumen	Laporan Hasil Monev				1	3.000.000	Bagian Organisasi	BKPP
				Pendampingan penyusunan peta Proses Bisnis Perangkat Daerah	dokumen	Terlaksananya pendampingan penyusunan Peta Probis			1		2.500.000	Bagian Organisasi	Bagian Hukum
				Penyusunan Raperda tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah	dokumen	Persetujuan Perda tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah		1			90.000.000	Bagian Organisasi	Bagian Hukum
				Penyusunan Raperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja PD	dokumen	Ditetapkannya Perbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja PD				6	10.000.000	Bagian Organisasi	Perangkat Daerah
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	4,08	4,10	Reviu hasil penilaian atas indeks SPBE pada tahun sebelumnya	dokumen	Jumlah dokumen hasil reviu		1			-	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
				Melaksanakan audit TIK berupa audit aplikasi dan infrastruktur SPBE	dokumen	Jumlah dokumen audit TIK yang disusun			1		-	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Capaian 2023	Target 2024	Rencana Aksi	Output		Target				Jumlah Anggaran	PD	
					Satuan	Indikator output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Penyusun Renaksi	Pelaksana
				Menyusun dokumen manajemen SPBE	dokumen	Jumlah dokumen manajemen SPBE yang disusun			1		-	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
				Identifikasi dan penyusunan bukti dukung evaluasi SPBE tahun 2024	dokumen	Jumlah dokumen evaluasi SPBE				1	9.000.000	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
	Tingkat Implementasi Kebijakan	1	1	Menyusun petunjuk teknis implementasi arsitektur SPBE	dokumen	Jumlah dokumen SOP yang disusun			1		-	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
	Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			Sosialisasi implementasi arsitektur SPBE	PD	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti sosialisasi				42	5.000.000	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83,7	83,7	Penyusunan pohon kinerja berdasarkan Permenpan RB 89 Tahun 2021	dokumen	Penyusunan dokumen pohon kinerja Pemda				1	2.500.000	Bagian Organisasi	Bappeda
				Reviu definisi operasional pada manual IKU Pemda dan PD	dokumen	Jumlah hasil reviu atas manual IKU yang dilakukan				1	2.160.000	Bagian Organisasi	Bappeda
				Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah secara berkala	dokumen	Jumlah hasil monev kinerja triwulanan	1	1	1	1	8.640.000	Bappeda	Bappeda
				Penyusunan laporan kinerja dengan analisis data yang lengkap	PD	Jumlah PD yang melakukan pelaporan kinerja dengan lengkap				42	2.160.000	Bagian Organisasi	Inspektorat Daerah
				Melakukan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	PD	Jumlah PD yang dilakukan evaluasi SAKIP	42				2.160.000	Bagian Organisasi	Inspektorat Daerah

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Capaian 2023	Target 2024	Rencana Aksi	Output		Target				Jumlah Anggaran	PD	
					Satuan	Indikator output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Penyusun Renaksi	Pelaksana
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	1,5	1,5	Pendampingan pengusulan Perangkat Daerah untuk berpredikat WBK	unit	Jumlah PD yang memenuhi persyaratan pengusulan WBK		2			3.175.000	Inspektorat Daerah	Perangkat Daerah
				Pendampingan pengusulan Perangkat Daerah untuk berpredikat WBM	unit	Jumlah PD yang memenuhi persyaratan pengusulan WBM		2			-	Inspektorat Daerah	Perangkat Daerah
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3,152	3,16	Sosialisasi implementasi SPIP	kegiatan	Jumlah sosialisasi implementasi SPIP		1			750.000	Inspektorat Daerah	Perangkat Daerah
				Melakukan penilaian mandiri Maturitas SPIP	PD	Jumlah PD yang melakukan penilaian mandiri		42			750.000	Inspektorat Daerah	Perangkat Daerah
				Melakukan pengusulan evaluasi maturitas SPIP ke BPKP	kegiatan	Terlaksananya evaluasi maturitas SPIP level Pemda			1			-	Inspektorat Daerah
				Sosialisasi pelaksanaan Manajemen Risiko	kegiatan	Jumlah sosialisasi pelaksanaan manajemen risiko	1		1		1.500.000	Inspektorat Daerah	Perangkat Daerah
				Evaluasi Manajemen Risiko Perangkat Daerah	PD	Jumlah PD yang dilakukan evaluasi manajemen resiko		42			1.500.000	Inspektorat Daerah	Perangkat Daerah
				Penyusunan register risiko dengan menambahkan kolom fraud/ kecurangan yang akan dilakukan evaluasi pada saat penilaian manajemen resiko	dokumen	Jumlah surat/ informasi	1	42			1.500.000	Inspektorat Daerah	Perangkat Daerah

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Capaian 2023	Target 2024	Rencana Aksi	Output		Target				Jumlah Anggaran	PD	
					Satuan	Indikator output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Penyusun Renaksi	Pelaksana
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2	2	Melaksanakan desain layanan konsultasi dan pengaduan	%	Teraplikasinya desain layanan konsultasi			100		-	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
				Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan pengaduan	Sistem	Jumlah inovasi sarana pengaduan			1		-	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
				Monitoring dan evaluasi secara berkala penguatan layanan konsultasi dan pengadaan	Dokumen	Instrumen monitoring dan evaluasi pengaduan			1		-	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
				Penguatan layanan konsultasi dan tindak lanjut pengaduan	kali	Jumlah sosialisasi dan koordinasi layanan pengaduan	0	1	0	1	-	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
				Optimalisasi tindak lanjut pengaduan masyarakat	Aduan	Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu	20	20	20	20	-	Dinas Kominfo	Perangkat Daerah
				Monitoring dan evaluasi layanan aduan secara berkala	Dokumen	Jumlah laporan tindak lanjut Aduan	0	0	0	1	-	Dinas Kominfo	Perangkat Daerah
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas	78,79	82,0	Penyampaian Responden Ke KPK	Unit	Jumlah Unit yang menyampaikan responden		20			-	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
				Sosialisasi Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas	kali	Jumlah pelaksanaan sosialisasi		1			1.750.000	Inspektorat Daerah	Perangkat Daerah
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	45,61	45,61	Menyusun edaran kepada PD untuk dapat menertibkan dokumen administrasi dokumen usulan Raperda	Dokumen	Tersusunnya edaran tertib administrasi produk hukum			1		1.350.000	Bagian Hukum	Bagian Hukum

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Capaian 2023	Target 2024	Rencana Aksi	Output		Target				Jumlah Anggaran	PD	
					Satuan	Indikator output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Penyusun Renaksi	Pelaksana
				Melaksanakan publikasi/ uji publik terhadap Raperda	Kegiatan	Publikasi media masa	1	1	2		2.400.000	Bagian Hukum	Bagian Hukum
				Melakukan monitoring dan evaluasi produk hukum	Produk hukum	Monev produk hukum			1	1	1.080.000	Bagian Hukum	Bagian Hukum
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	87,83	88	Harmonisasi produk hukum	Perda	Jumlah tindaklanjut hasil harmonisasi produk hukum		2	2		12.200.000	Bagian Hukum	Bagian Hukum
				Peningkatan kompetensi SDM	pertemuan	Jumlah diklat yang dilakukan penyusun dan perancang peraturan perundang-undangan			1	0	5.540.000	Bagian Hukum	Bagian Hukum
				Melaksanakan monev produk hukum	Produk hukum	Jumlah tindaklanjut produk hukum yang dilakukan monev				1	540.000	Bagian Hukum	Bagian Hukum
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	65,77	65,77	Perbup klasifikasi, SKKAD, JRA	Dokumen	Perbup	3				-	Dinas Perpusip	Dinas Perpusip
				Penyusunan laporan implemntasi kearsipan PD	Dokumen	Tersusunnya laporan implementasi kearsipan	1	1	1	1	-	Dinas Perpusip	Dinas Perpusip
				Terlaksananya bimtek kearsipan kepada PD	kali	Terlaksananya bimtek kearsipan	2	2	2		2.000.000	Dinas Perpusip	Perangkat Daerah
				Ssosialisasi implementasi SRIKANDI	kali	Terlaksananya sosialisasi SRIKANDI	1				-	Dinas Perpusip	Perangkat Daerah
Pelaksanaan Data Statistik Sektor	Indeks Pembangunan Statistik	2	2,61	Pembentukan TIM	dokumen	SK TIM	1				229.373.700	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Capaian 2023	Target 2024	Rencana Aksi	Output		Target				Jumlah Anggaran	PD	
					Satuan	Indikator output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Penyusun Renaksi	Pelaksana
				Rapat Koordinasi Statistik Sektoral	dokumen	Jumlah hasil rapat koordinasi	1				-	Dinas Kominfo	Perangkat Daerah
				Pengumpulan data statistik sektoral	Data sektoral	Data yang terkumpul		1	1	1	-	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
				Verifikasi dan Validasi (Desk) Data Statistik	dokumen	Berita Acara verifikasi dan validasi data	1	1	1		-	Dinas Kominfo	Perangkat Daerah
				Publikasi data statistik sektoral	dokumen	Jumlah data statistik sektoral yang terpublikasi				1	-	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
				Penyusunan daftar data untuk pengumpulan tahun berikutnya	dokumen	Jumlah dokumen daftar data yang tersusun				1	-	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
				Penyusunan metadata	dokumen	Jumlah dokumen metadata statistik sektoral yang tersusun				1	-	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	72,18	75,8	Menyusun edaran optimalisasi pemanfaatan sistem dalam proses pengadaan	dokumen	Surat edaran proses pengadaan barang dan jasa	1				-	Bagian PBJ	Bagian PBJ
				Pelaksanaan entry SIRUP, e-purchasing, tender, non tender dan e-kontrak	bulan	Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa	3	3	3	3	-	Bagian PBJ	Perangkat Daerah
				Workshop peningkatan kompetensi PPK	kegiatan	Terlaksananya workshop	2		1		-	Bagian PBJ	PPK
				Penambahan SDM Jabfung Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa melalui perpindahan jabatan	orang	Jumlah penambahan SDM Jabfung Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	2				-	Bagian PBJ	Bagian PBJ

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Capaian 2023	Target 2024	Rencana Aksi	Output		Target				Jumlah Anggaran	PD	
					Satuan	Indikator output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Penyusun Renaksi	Pelaksana
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	Pendampingan Penyusunan RKA (KUAPPAS, DPA, APBD)	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pendampingan penyusunan RKA	43		8	46	121.750.000	BKAD	BKAD
				Pendampingan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Bendahara	kegiatan	Jumlah pendampingan dan pembinaan pengelolaan keuangan	2		1		11.572.000	BKAD	BKAD
				Melaksanakan Rekonsiliasi Aset dan Persediaan tiap triwulan	kegiatan	Jumlah rekonsiliasi aset dan persediaan	3	4	3	4	15.750.000	BKAD	BKAD
				Melaksanakan Koordinasi dan Pedampingan Penyusunan Laporan Keuangan	kegiatan	Jumlah pendampingan penyusunan laporan keuangan		1		1	58.990.000	BKAD	BKAD
				Melaksanakan Evaluasi PAD	laporan	Jumlah laporan hasil evaluasi PAD	3	3	3	3	16.200.000	BKAD	BKAD
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	95,2	95,3	Memperbaiki basis data pajak hotel dan pajak restoran	data	Jumlah perbaikan data pajak hotel dan pajak restoran	5	5	9	4	17.680.000	BKAD	BKAD
				Penyusunan rencana aksi pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah	dokumen	Dokumen rencana aksi pengawasan	2		2		5.100.000	BKAD	BKAD
				Melakukan evaluasi perbup atas penyelenggaraan reklame khususnya tentang jaminan biaya penurunan reklame	kegiatan	Terlaksananya evaluasi perbup atas penyelenggaraan reklame			1		2.025.000	BKAD	BKAD

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Capaian 2023	Target 2024	Rencana Aksi	Output		Target				Jumlah Anggaran	PD	
					Satuan	Indikator output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Penyusun Renaksi	Pelaksana
				Melakukan monitoring pelaksanaan Perbup atas penyelenggaraan reklame secara berkala	bulan	Jumlah bulan monitoring Perbup	1	2			4.050.000	BKAD	BKAD
				Melakukan <i>clearing</i> dan <i>cleansing</i> data obyek pajak	kalurahan	Jumlah kalurahan yang dilakukan <i>clearing</i> dan <i>cleansing</i>	6		5	5	27.008.600	BKAD	BKAD
				Menetapkan kebijakan terkait mekanisme penatausahaan barang persediaan yang rusak/ invalid	dokumen	Jumlah dokumen kebijakan mekanisme penatausahaan barang		1			2.025.000	BKAD	BKAD
				Melakukan inventarisasi aset tetap irigasi	laporan	Jumlah laporan inventarisasi aset		1			3.225.000	BKAD	BKAD
				Melengkapi data dan informasi aset tetap irigasi yang belum tersedia pada KIB A	laporan	Data informasi aset tetap irigasi pada KIB A		1			3.150.000	BKAD	BKAD
<b>SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional</b>													
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	314	314	Melaksanakan pemetaan kompetensi seluruh pegawai	Kali	Jumlah penilaian kompetensi pegawai	1	2		1	3.150.000	BKPP	BKPP
				Pemanfaatan aplikasi E-Karir untuk seleksi JPT Terbuka	Laporan	Laporan hasil pemanfaatan data dari aplikasi E-Karir		1				BKPP	BKPP

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Capaian 2023	Target 2024	Rencana Aksi	Output		Target				Jumlah Anggaran	PD	
					Satuan	Indikator output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Penyusun Renaksi	Pelaksana
				Pemanfaatan Aplikasi EMT (Elektronik Manajemen Talenta) sebagai sistem pendukung keputusan untuk seleksi promosi.	Laporan	Laporan hasil pemanfaatan data dari Aplikasi EMT		1		1		BKPP	BKPP
				Melaksanakan pemantauan kinerja pegawai berdasarkan hasil kinerja pada Aplikasi E-Kinerja	Kali	Jumlah pelaksanaan pemantauan kinerja pegawai		1			104.284.800	BKPP	BKPP
				Membuat aplikasi ERP ( <i>Elektronik Reward and Punishment</i> ) sebagai instrumen analisis permasalahan kinerja	Aplikasi	Tersedianya aplikasi ERP			1		96.513.600	BKPP	BKPP
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAkhlak	62,8	67,14	Optimalisasi internalisasi core values ASN BerAkhlak pada Perangkat daerah	orang	Jumlah ASN yang telah mendapatkan sosialisasi			100		5.000.000	Bagian Organisasi	Perangkat Daerah
				Integrasi core values BerAkhlak dalam perencanaan kinerja individu	kegiatan	Sinkronisasi core values dalam SKP	3	3	3	3	-	BKPP	Perangkat Daerah
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	4,26	4,26	Pendampingan ULE dalam pelaksanaan PEKPP	PD	Jumlah ULE			3		3.000.000	Bagian Organisasi	Perangkat Daerah
				Pelaksanaan evaluasi mandiri PEKPP	PD	Jumlah ULE			3		-	Bagian Organisasi	Perangkat Daerah
	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	89,21	89,21	Monitoring Evaluasi Penyusunan/Evaluasi SP Perangkat Daerah	PD	Jumlah Perangkat yang telah menyusun/ mengevaluasi SP		1			2.000.000	Bagian Organisasi	Perangkat Daerah

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Capaian 2023	Target 2024	Rencana Aksi	Output		Target				Jumlah Anggaran	PD	
					Satuan	Indikator output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Penyusun Renaksi	Pelaksana
				Pelaksanaan FGD Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan	kegiatan	Jumlah FGD Konsultasi Publik yang dilakukan		1	1		-	Bagian Organisasi	Perangkat Daerah
	Survei Kepuasan Masyarakat	84,05	84,05	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	UPP	Jumlah UPP			43		30.000.000	Bagian Organisasi	Perangkat Daerah
				Tindaklanjut hasil evaluasi SKM	PD	Jumlah PD yang dilakukan monitoring tindaklanjut				42	-	Bagian Organisasi	Perangkat Daerah

## B. Rencana Aksi Tematik

### 1. Penentuan Tema

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yang diimplementasikan di Kabupaten Kulon Progo agar dapat berdampak langsung bagi masyarakat, difokuskan pada:

- a) Penanggulangan Kemiskinan dengan sasaran menurunnya angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Kulon Progo
- b) Peningkatan Investasi dengan sasaran meningkatnya nilai investasi di wilayah Kabupaten Kulon Progo
- c) Pengendalian Inflasi dengan sasaran terkendalinya tingkat inflasi daerah di wilayah Kabupaten Kulon Progo
- d) Digitalisasi Administrasi dengan sasaran meningkatnya implementasi transformasi digital yang diimplementasikan dalam penurunan prevalensi stunting di wilayah Kabupaten Kulon Progo
- e) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan sasaran meningkatnya penggunaan produk dalam negeri di wilayah Kabupaten Kulon Progo

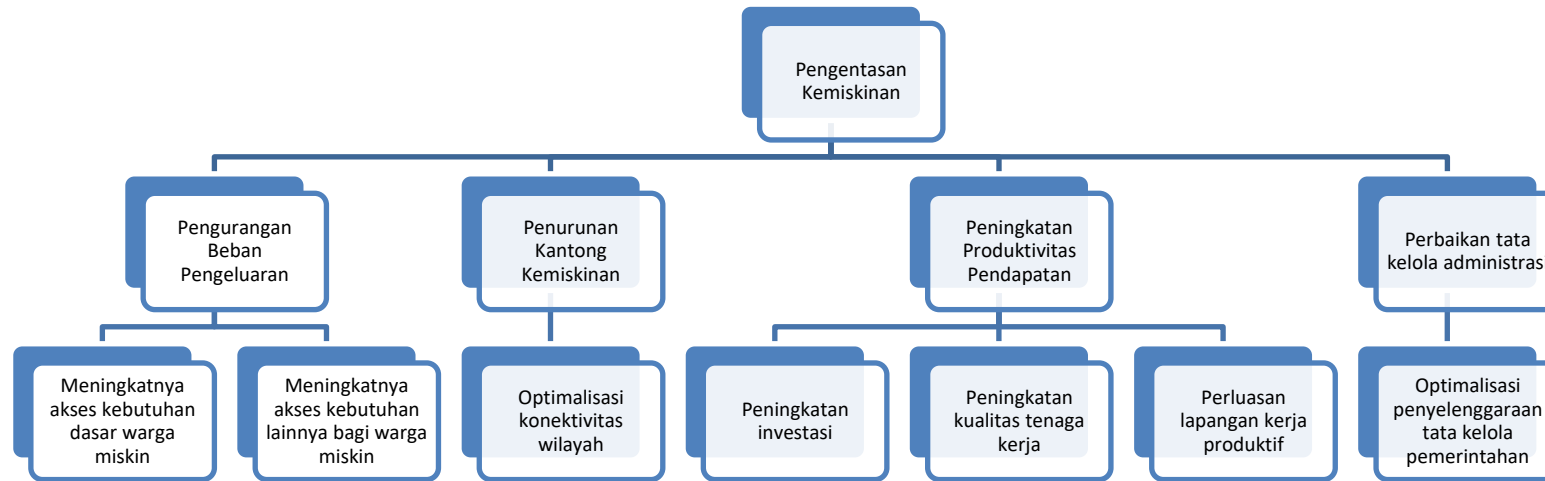
### 2. Gambaran Kondisi Saat Ini

Sasaran Tematik	Indikator	Kondisi saat ini
Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Telah ditetapkannya Keputusan Bupati Kulon Progo nomor 219/A/2021 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo dan telah menetapkan Rencana Aksi Tahunan program kegiatan pengentasan kemiskinan tahunan yang diintervensi oleh Perangkat Daerah terkait. Penurunan angka kemiskinan ini didukung oleh upaya keras dari pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui program pro-rakyat. Adanya gerakan bela beli Kulon Progo diantaranya Batik geblek renteng, Airku. Adanya <i>data base</i> Album Kemiskinan <i>by name, by address</i> dan <i>by case</i> yang secara transparan dipublikasikan dan didokumentasikan dalam Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Simnangkis) dalam upaya ketepatan sasaran program. Data kemiskinan <i>terupdate</i> dalam sistem P3KE. Namun angka kemiskinan masih cukup tinggi, karena pendapatan rendah dan kegiatan investasi yang belum maksimal.
Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	Keberadaan Bandara YIA belum mampu memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan investasi daerah. Untuk itu diperlukan terobosan dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di Kulon Progo. Harga lahan yang akan digunakan untuk investasi yang relatif tinggi (yaitu pada lahan yang berstatus lahan milik masyarakat) sehingga menimbulkan investasi biaya tinggi ( <i>high cost invesment</i> ). Infrastruktur, sarana dan prasarana pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi kabupaten dan kawasan peruntukan industri masih relatif minim

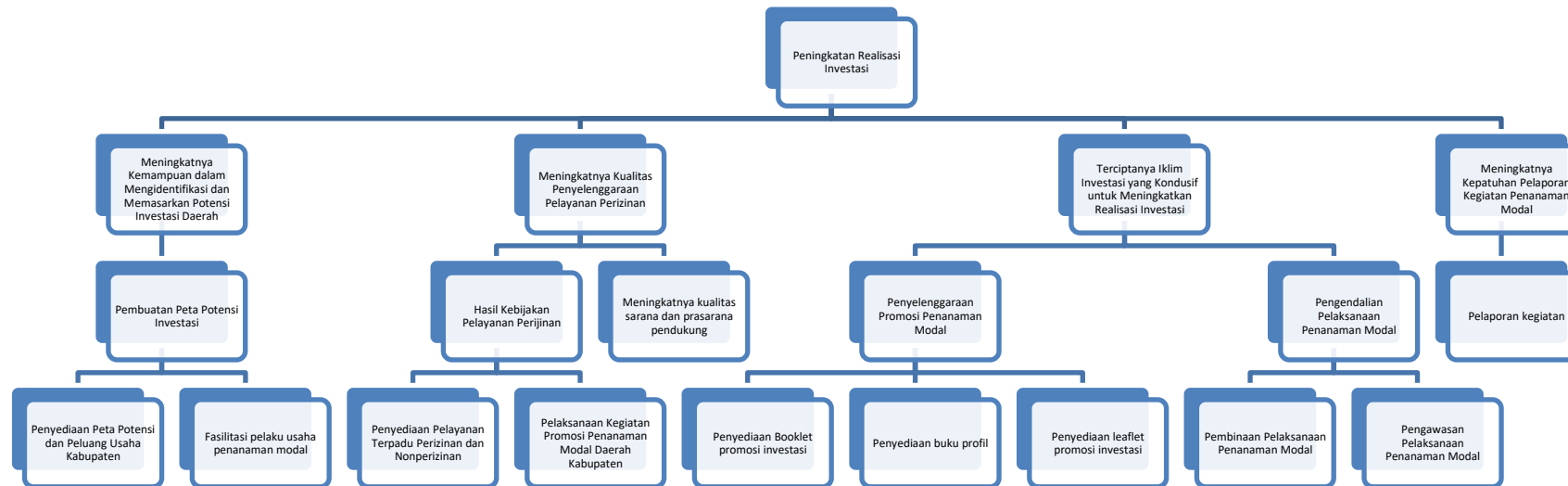
Meningkatnya implementasi transformasi digital	<i>Data Base Stunting</i>	Telah ditetapkan Perubahan Bupati Kulon Progo nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 37 Tahun 2018 tentang Penanganan <i>Stunting</i> di Daerah. Adanya aplikasi BumilKu yang awalnya digunakan untuk pemantauan angka kematian ibu dan bayi, akan dilakukan pengembangan dengan cara pemantauan mulai dari kesehatan calon ibu
Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Proses pengadaan barang/ jasa sudah mengakomodir penggunaan produk dalam negeri dan mengalami peningkatan dibanding tahun anggaran sebelumnya
Terkendalnya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	Ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di Kulon Progo mencukupi. Kulon Progo merupakan daerah surplus terutama cabai rawit, cabai besar, bawang merah. Beberapa komoditas kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan karena adanya kenaikan permintaan pada saat event tertentu, pengaruh cuaca dan musim

### 3. Penetapan Kerangka Logis

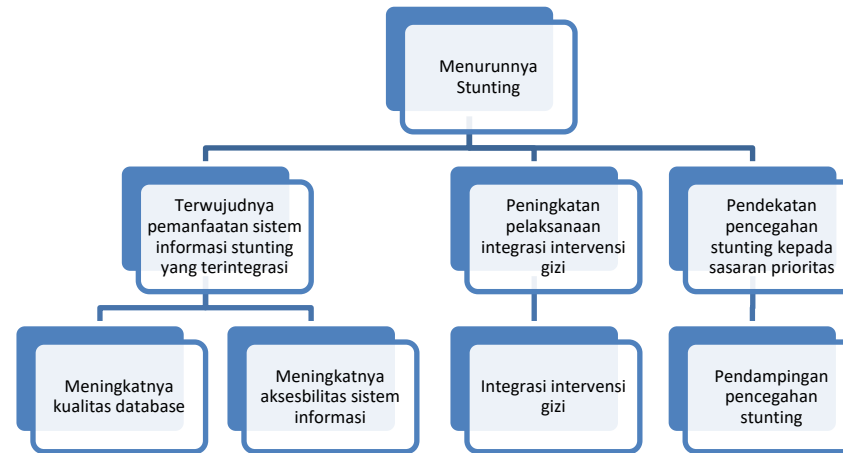
#### a) Menurunnya angka kemiskinan



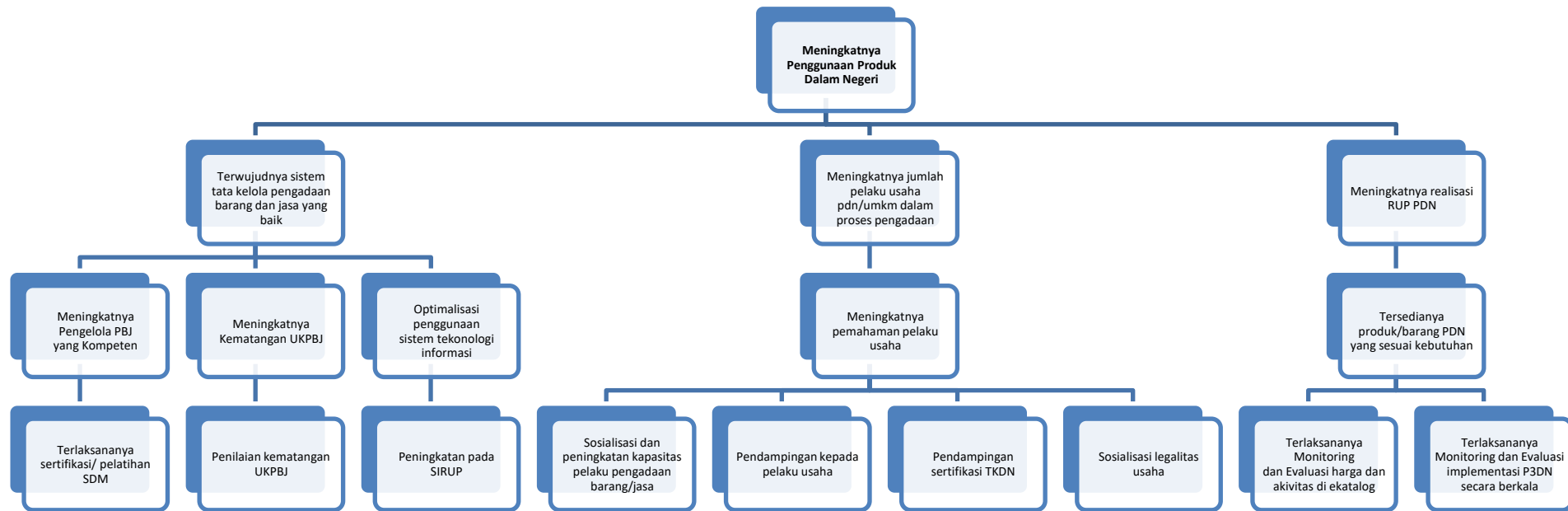
#### b) Meningkatnya nilai investasi



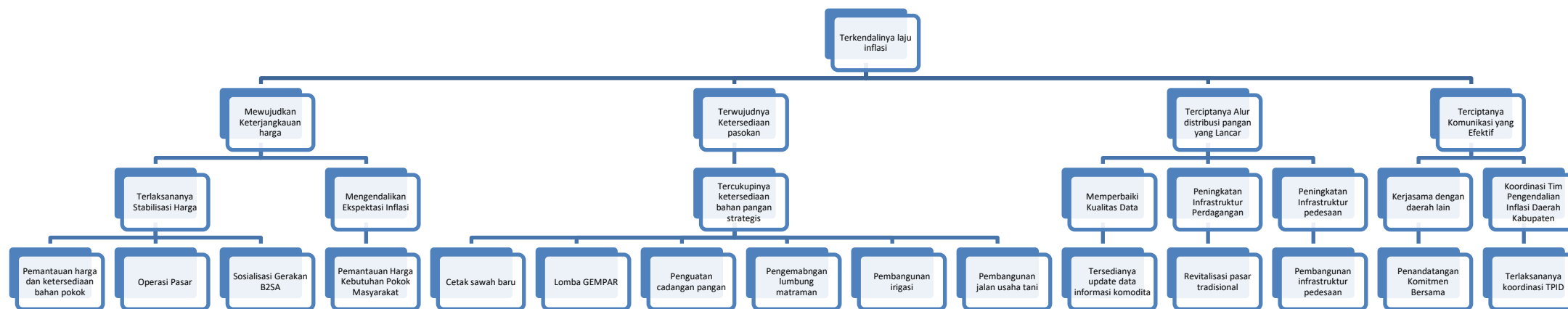
c) Penanganan Stunting



d) Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri



e) Terkendalnya tingkat inflasi daerah



4. Penyusunan Rencana Aksi

a) Menurunnya angka kemiskinan

Sasaran (Immediate Outcome)	Indikator	Permasalahan	Sasaran dalam mengatasi Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target Tahun 2024	Rencana Aksi	Output		Target				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			Koordinator	Pelaksana
Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Belum terpenuhinya akses kebutuhan dasar bagi warga miskin	Meningkatnya akses kebutuhan dasar warga miskin	Terpenuhinya akses kebutuhan dasar bagi warga miskin	3 laporan	Pemberian Bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni	KK	Tersalurkannya bantuan RTLH	50	50	50	50	4.000.000.000	Lain-lain	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Pelaksanaan Replikasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	KK	Terlaksananya replikasi BPNT	13200	13200	13200	13200	10.560.000.000	Lain-lain	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
						Pembayaran premi JKN bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja	bulan	Terbayarnya premi JKN peserta PBPUP dan BP	3	3	3	3	19.458.600.000	Lain-lain	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Kesehatan
		Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan	Meningkatnya akses kebutuhan	Pemberian bantuan sosial dan hibah bagi penerima manfaat	13 laporan	Pemberian Bantuan Langsung Tunai DBHCHT	orang	Tersalurkannya bantuan DBHCHT				704	422.400.000	Lain-lain	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

Sasaran ( <i>Inmediate Outcome</i> )	Indikator	Permasalahan	Sasaran dalam mengatasi Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target Tahun 2024	Rencana Aksi	Output		Target				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			Koordinator	Pelaksana
		pendukung bagi kehujaan warga miskin	lainnya bagi warga miskin													Perlindungan Anak
						Pemberian Bantuan Program Sembako	KPM	Tersalurkannya bantuan sembako	44186	44186	44186	44186	35.348.800.000	Lain-lain	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
						Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dengan alokasi Jenjang SD, SMP	siswa	Tersalurkannya bantuan sosial BSM jenjang SD dan SMO			828		934.050.000	Lain-lain	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Pendidikan dan Pora
						Pembayaran premi jaminan kecelakaan kerja untuk masyarakat dengan profesi penderes dan nelayan	bulan	Terbayarnya premi JKK bagi profesi penderes dan nelayan	3	3	3	3	532.425.600	Lain-lain	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BKAD
						Pemberian Bantuan Jambanisasi	KK	Tersalurkannya bantuan jambanisasi	40	40	40	38	395.000.000	Lain-lain	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Kesehatan
						Pemberian Bantuan bagi pemenuhan kebutuhan dasar permakanan LKS Panti Asuhan dan Jompo	panti asuhan	Tersalurkannya bantuan bagi panti asuhan		21			320.000.000	Lain-lain	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
						Pemberian Bantuan sosial bagi Anak Balita	anak	Tersalurkannya bantuan sosial bagi anak balita		100			100.000.000	Lain-lain	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
						Pemberian Bantuan Sosial pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	orang	Tersalurkannya bantuan sosial akses layanan pendidikan dan kesehatan		24			12.000.000	Lain-lain	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
						Pemberian Bantuan yatim piatu	anak	Tersalurkannya bantuan yatim piatu			200		200.000.000	Lain-lain	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
						Pemberian Bantuan Sosial sambungan listrik	paket	Tersalurkannya bantuan sambungan listrik				1	162.000.000	Lain-lain	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

Sasaran (Immediate Outcome)	Indikator	Permasalahan	Sasaran dalam mengatasi Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target Tahun 2024	Rencana Aksi	Output		Target				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Satuan Kerja Pelaksana		
							Satuan	Indikator output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			Koordinator	Pelaksana	
																Perlindungan Anak	
						Pemberian Hibah untuk pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	KKM	Tersalurkannya hibah SPAM				2	595.786.000	Lain-lain	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	
						Pemberian Hibah Pembangunan Tangki Septic Skala Individual	lokasi	Tersalurkannya hibah tangki Septic skala individual			5		1.560.000.000	Lain-lain	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	
						Hibah Peningkatan dan Pengembangan Layanan Air Bersih Masyarakat	KKM	Tersalurkannya pengembangan layanan air bersih			5		2.577.000.000	Lain-lain	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Pendapatan masyarakat yang belum merata, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan hidup	Perluasan lapangan kerja produktif	Terpenuhinya sarana prasarana usaha	5 laporan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tanaman	kegiatan	Meningkatnya kualitas SDG			7			Lain-lain	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	
						Pemanfaatan SDG berupa festival kopi dan bantuan thresher bermotor dan terpal	kelompok tani	Terselenggaranya festival kopi dan penyerahan bantuan			4				Lain-lain	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan
						Pemberian Bantuan Sarana Pendukung Pertanian	kelompok tani	Tersalurkannya bantuan sarana pendukung pertanian			6				Lain-lain	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan
						Pengadaan bibit temak	kegiatan	Tersedianya bibit temak			4			Lain-lain	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	
						Cetak Sawah Baru	ha	Tersedianya sawah baru			25		648.403.200	Lain-lain	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	
		Belum optimalnya produktifitas kerja karena keterbatasan ketrampilan tenaga kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja	Terselenggaranya pelatihan bagi tenaga kerja	7 laporan	Pelatihan Wira Usaha Baru (kuliner)	kegiatan	Terlaksanya pelatihan WUB (kuliner)		3				Sumber Daya Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Pelatihan Wira Usaha Baru (sandang-ecoprint)	kegiatan	Terlaksanya pelatihan WUB (sandang)		3				Sumber Daya Manusia	Badan Perencanaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Sasaran (Immediate Outcome)	Indikator	Permasalahan	Sasaran dalam mengatasi Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target Tahun 2024	Rencana Aksi	Output		Target				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			Koordinator	Pelaksana
															Pembangunan Daerah	
						Pelatihan Olah Bahan Baku lokal, pelatihan kuliner mengolah umbi-umbian	kegiatan	Terlaksananya pelatihan olah bahan baku			3			Sumber Daya Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Pelatihan Desain Produk Bagi Pelaku Industri Kreatif, pelatihan membuat desain busana	kegiatan	Terlaksananya pelatihan desain produk			1			Sumber Daya Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Pelatihan Pemanfaatan Tekologi dan Desain, pelatihan membuat cap batik	kegiatan	Terlaksananya pelatihan pemanfaatan Teknologi				1		Sumber Daya Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pelaku Industri Kreatif, digital marketing	kegiatan	Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas pelaku industri				1		Sumber Daya Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	kegiatan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan			3		250.000.000	Sumber Daya Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan
		Belum optimalnya akses infrastruktur jalan guna distribusi bahan pokok	Optimalisasi konektivitas wilayah	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan	4 laporan	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	kegiatan	Terlaksananya pembangunan rehab dan pemel JUT			5			Lain-lain	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan
						Hibah padat karya jalan lingkungan	LPMKal	Terlaksananya hibah padat karya		19	18		4.900.000.000	Lain-lain	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat TMMD	LPMKal	Terfasilitasinya BBGRM		4			730.000.000	Lain-lain	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB
						Padat Karya Infrastruktur	lokasi	Terlaksananya padat karya infrastruktur		37	37		8.300.000.000	Lain-lain	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sasaran (Immediate Outcome)	Indikator	Permasalahan	Sasaran dalam mengatasi Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target Tahun 2024	Rencana Aksi	Output		Target				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			Koordinator	Pelaksana
		Belum optimalnya sinergitas program/ kegiatan pengentasan kemiskinan yang langsung terkait dengan masyarakat	Singkronisasi program kegiatan pengentasan kemiskinan	Pengelolaan sistem, data, verifikasi, program kemiskinan	2 laporan	Optimalisasi peran TPKD Tingkat Kabupaten	kegiatan	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi program kegiatan kemiskinan	1	1	1	1		Pengawasan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Melakukan verifikasi detail untuk mendapatkan data nama dan alamat warga miskin	kegiatan	updating data pada sidadungmasnisku	1	1	1	1			Peta Proses Bisnis dan SOP	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

b) Meningkatnya nilai investasi

Sasaran (Immediate Outcome)	Indikator	Permasalahan	Sasaran dalam mengatasi Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target Tahun 2024	Rencana Aksi	Output		Target				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			Koordinator	Pelaksana
Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	Belum tersedianya kajian potensi investasi untuk masing-masing kawasan yang dapat dipromosikan kepada investot baik didalam maupun luar negeri	Pembuatan Peta Potensi Investasi	Tersusunnya peta potensi investasi	1 dokumen	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	Tersusunnya dokumen kajian potensi dan peluang investasi			1		105.309.200	Perencanaan dan Penganggaran	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu SP	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu SP
						Fasilitasi pelaku usaha penanaman modal	Kali	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal		2					19.132.300	Pengawasan
		Sosialisasi Rencana Pengembangan Investasi	Orang	Jumlah peserta sosialisasi rencana pengembangan investasi			60		3.000.000	Sumber Daya Manusia	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu SP	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu SP				
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	pelaku usaha	Terselenggaranya pelayanan perijinan kepada pelaku usaha	620	620	650	660	281.928.000	Teknologi dan Informasi	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu SP	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu SP				
		Masih banyak investor/calon investor yang belum memiliki informasi tentang	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi penanaman modal	3 Dokumen	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Kali	Jumlah kegiatan Forum Investasi	1	1	1		202.820.800	Perencanaan dan Penganggaran	Dinas Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal

Sasaran (Immediate Outcome)	Indikator	Permasalahan	Sasaran dalam mengatasi Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target Tahun 2024	Rencana Aksi	Output		Target				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			Koordinator	Pelaksana
		potensi dan peluang investasi di Kulon Progo				Daerah Kabupaten/Kota									Pelayanan Terpadu SP	Pelayanan Terpadu SP
							Penyediaan Booklet promosi investasi	Dokumen	Jumlah booklet investasi yang disusun	1					Perencanaan dan Penganggaran	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu SP
						Penyediaan buku profil	Dokumen	Jumlah buku profil yang disusun	1					Perencanaan dan Penganggaran	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu SP	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu SP
						Penyediaan leaflet promosi investasi	Rim	Jumlah leaflet promosi investasi yang disusun		4				Perencanaan dan Penganggaran	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu SP	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu SP
						Forum Investasi Daerah	Kali	Jumlah kegiatan Forum Investasi Daerah yang dilaksanakan	1	1	1			Perencanaan dan Penganggaran	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu SP	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu SP
						Keikutsertaan dalam Pameran Investasi dalam dan luar daerah	Kali	Terpublikasinya potensi dan peluang investasi dalam kegiatan pameran investasi		1		1		Perencanaan dan Penganggaran	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu SP	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu SP
		Belum semua pelaku usaha memenuhi NSPK yang ditentukan dalam menjalankan usahanya	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	30 Kegiatan Usaha	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usaha	Kegiatan Usaha (KBLI)	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usaha	4	7	4		18.300.000	Pengawasan	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu SP	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu SP
						Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko		150	150		738.229.600	Pengawasan	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu SP	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu SP

Sasaran ( <i>Inmediate Outcome</i> )	Indikator	Permasalahan	Sasaran dalam mengatasi Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target Tahun 2024	Rencana Aksi	Output		Target				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			Koordinator	Pelaksana
						Pengawasan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha (Kali)	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha.	9	9	9	3	81.867.756	Pengawasan	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu SP	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu SP

c) Penanganan Stunting

Sasaran ( <i>Inmediate Outcome</i> )	Indikator	Permasalahan	Sasaran dalam mengatasi Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target Tahun 2024	Rencana Aksi	Output		Target				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			Koordinator	Pelaksana
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan untuk Menurunnya prevalensi stunting	Prevalensi Stunting	Kapasitas SDM yang belum seluruhnya menguasai sistem informasi	Meningkatnya kualitas database	Prosentase capaian laporan monev berkala	2 Laporan	Peningkatan kapasitas SDM pengelola database	Puskesmas	Jumlah peningkatan kapasitas SDM pengelola database				21		Sumber Daya Manusia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Kesehatan
							Laporan	Jumlah laporan data stunting yang dilaporkan		1		1		Pengawasan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Kesehatan
		Belum optimalnya pemantauan pencegahan dan penanganan kasus stunting dikarenakan perbedaan data dengan SDGI	Meningkatnya aksesibilitas sistem informasi	Tersedianya data dalam sistem	3 Laporan	Peningkatan kualitas infrastruktur sistem informasi	Kegiatan	Jumlah pengembangan sistem informasi			1	1		Teknologi dan Informasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Kesehatan
						Koordinasi dan kerjasama dengan penyedia jasa	Kegiatan	Jumlah kerjasama dengan penyedia			1	1		Teknologi dan Informasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Kesehatan
						Sosialisasi sistem informasi	Kegiatan	Jumlah sosialisasi sistem	1	1	1	1		Sumber Daya Manusia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Kesehatan

Sasaran (Immediate Outcome)	Indikator	Permasalahan	Sasaran dalam mengatasi Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target Tahun 2024	Rencana Aksi	Output		Target				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Satuan Kerja Pelaksana		
							Satuan	Indikator output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			Koordinator	Pelaksana	
																Pengendalian Penduduk dan KB	
		Pencegahan stunting yang dipengaruhi berbagai faktor yang sangat kompleks mulai dari caten sampai dengan ibu bersalin	Monitoring dan evaluasi kasus stunting	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kasus stunting oleh TPPS Kabupaten dan Kalurahan	11 Laporan	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting oleh Kader Tim Pendamping Keluarga tiap bulan	kali	Terpantaunya data dan informasi keluarga yang berisiko stunting	3	3	3	3	687.000.000	Lain-lain	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	
						FGD Analisis Situasi Stunting	kali	Terlaksananya FGD analisis situasi stunting	3				8.400.000	Lain-lain	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	
						FGD Penyusunan Rencana Kerja	kali	Terlaksananya FGD Penyusunan Rencana Kerja	3				8.400.000	Lain-lain	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	
						FGD TPPS Kabupaten dengan Kalurahan	kali	Terlaksananya FGD TPPS Kabupaten dengan Kalurahan	1				38.950.000	Lain-lain	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	
						FGD Persiapan Rembug Stunting	kali	Terlaksananya FGD Persiapan Rembug Stunting		1			2.930.000	Lain-lain	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	
						Workshop Rembuk Stunting	kali	Terlaksananya Workshop Rembuk Stunting		1			25.700.000	Lain-lain	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	

Sasaran (Immediate Outcome)	Indikator	Permasalahan	Sasaran dalam mengatasi Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target Tahun 2024	Rencana Aksi	Output		Target				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			Koordinator	Pelaksana
						FGD Pembuatan Dokumen Rembuk Stunting	kali	Terlaksananya FGD Pembuatan Dokumen Rembuk Stunting		1			2.995.000	Lain-lain	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB
						Workshop Kegiatan KPM oleh OPD	kali	Terlaksananya Workshop Kegiatan KPM oleh OPD		1			3.800.000	Lain-lain	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB
						Workshop Pembinaan KPM	kali	Terlaksananya Workshop Pembinaan KPM		1			396.500.000	Lain-lain	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB
						Workshop Persiapan Pengukuran Data Stunting	kali	Terlaksananya Workshop Persiapan Pengukuran Data Stunting			1		4.450.000	Lain-lain	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB
						FGD Penyusunan Manajemen Data Stunting	kali	Terlaksananya FGD Penyusunan Manajemen Data Stunting			1		4.450.000	Lain-lain	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB
						FGD Deseminasi Publikasi Hasil Data Stunting	kali	Terlaksananya FGD Deseminasi Publikasi Hasil Data Stunting				1	37.025.000	Lain-lain	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB
						Workshop Review Kinerja Tahunan TPPS	kali	Terlaksananya Workshop Review Kinerja Tahunan TPPS Kabupaten dan Kalurahan				1	2.800.000	Lain-lain	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian

Sasaran (Immediate Outcome)	Indikator	Permasalahan	Sasaran dalam mengatasi Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target Tahun 2024	Rencana Aksi	Output		Target				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			Koordinator	Pelaksana
						Kabupaten dan Kalurahan										Penduduk dan KB
						FGD Identifikasi Kasus Audit Kasus Stunting	kali	Terlaksananya FGD identifikasi kasus audit kasus stunting	1				5.340.000	Lain-lain	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB
						Workshop Seleksi Kasus Audit Kasus Stunting	kali	Terlaksananya workshop seleksi kasus audit stunting	1				11.700.000	Lain-lain	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB
						Workshop Desiminasi Kasus Audit Kasus Stunting	kali	Terlaksananya workshop desiminasi kasus stunting			1		26.480.000	Lain-lain	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB
						Workshop Evaluasi Kasus Audit Kasus Stunting	kali	Terlaksananya Workshop Evaluasi Kasus Audit Kasus Stunting			1	1	26.480.000	Lain-lain	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB
						Pengadaan BKB Kit Stunting	unit	Terlaksananya pengadaan BKB kit stunting			25		300.000.000	Lain-lain	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB

d) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

Sasaran (Immediate Outcome)	Indikator	Permasalahan	Sasaran dalam mengatasi Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target Tahun 2024	Rencana Aksi	Output		Target				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			Koordinator	Pelaksana
Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kurangya pemahaman OPD untuk melakukan tagging produk dalam negeri pada Rencana Umum Pengadaan	Optimalisasi penggunaan sistem teknologi informasi dalam pengadaan barang jasa	Tingkat kepatuhan pelaporan melalui sistem	1 laporan	Terlaksananya penilaian tingkat kematangan UKPBJ	kegiatan	Terpenuhinya bukti dukung kematangan UKPBJ	1	1	1	1	12,500,000.00	Pengawasan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
						Peningkatan pada SIRUP	PD	Jumlah PD yang mengumumkan RUP di SIRUP	63	63	63	63	51,999,800	Pengawasan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Kurangya pemahaman pelaku usaha terkait pengadaan P3DN	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha	Peningkatan kapasitas pelaku usaha	1 laporan	Sosialisasi dan peningkatan kapasitas pelaku pengadaan barang/jasa	kegiatan	Jumlah pembinaan pengembangan kapasitas pelaku usaha	2	0	1	1	83,841,100	Pengawasan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
						Pendampingan kepada pelaku usaha tentang katalog lokal dan toko daring	bulan	Jumlah waktu layanan kepada Pelaku usaha tentang katalog lokal dan toko daring	3	3	3	3	51,999,800	Pengawasan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
						Pendampingan Sertifikasi TKDN	Sertifikat	Terbitnya Sertifikat TKDN			20			Pengawasan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
						Sosialisasi TKDN	Pelaku Usaha	Pemahaman pelaku usaha terkait TKDN		20			5.500.000	Pengawasan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Belum optimalnya produk barang jasa P3DN dalam sistem	Tersedianya produk/barang PDN yang sesuai kebutuhan	Presentase barang/jasa PDN pada RUP	2 kali	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi harga dan aktivitas di ekatalog	Dokumen	Data aktivitas transaksi e-katalog		1		1		Pengawasan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
						Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi P3DN secara berkala	Dokumen	Data implementasi P3DN		1		1		Pengawasan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

e) Terkendalinya tingkat inflasi daerah

Sasaran (Immediate Outcome)	Indikator	Permasalahan	Sasaran dalam mengatasi Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target Tahun 2024	Rencana Aksi	Output		Target				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			Koordinator	Pelaksana
Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	Masyarakat terbatas dalam memenuhi kebutuhan pokok karena adanya kenaikan barang kebutuhan pokok	Tercapainya keterjangkauan harga oleh masyarakat melalui pemantauan harga komoditas strategis dan operasi pasar	Keterjangkauan Harga	4 laporan	Pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok dan penting di tingkat produsen dan konsumen secara berkala	data	Data pemantauan harga	3	3	3	3	243.268.000	Pengawasan	Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah	Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah
						Operasi Pasar	kali	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar	8	4				Pengawasan	Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah	Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah
		Ketersediaan beberapa komoditas pangan strategis yang masih terbatas	Tercukupinya ketersediaan bahan pangan strategis	Ketersediaan Pasokan	4 laporan	Cetak sawah baru	ha	Luasan Cetak Sawah Baru				25	648.403.200	Inovasi	Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan
						Sosialisasi Gerakan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	kali	Jumlah kegiatan sosialisasi		2			287.500.000	Sumber Daya Manusia	Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan
						Lomba Gerakan Penanaman Pekarangan (GEMPAR)	kali	Terlaksananya Lomba GEMPAR				1		Sumber Daya Manusia	Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan
						Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (Beras)	ton	Terlaksananya pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah				10	148.261.600	Pengawasan	Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan
						Pengembangan Lumbung Mataraman dan Pembinaan terhadap Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Lumbung Pangan Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan terhadap Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) sebanyak 15 LPM				15	698.795.000	Inovasi	Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan
						Pembangunan Irigasi Perpipaan/ Pembangunan Irigasi Tersier	lokasi	Terlaksananya Pembangunan Irigasi Perpipaan/ Pembangunan Irigasi Tersier				14	2.086.087.300	Lain-lain	Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan
						Pembangunan Jalan Usaha Tani	lokasi	Terlaksananya Pembangunan Jalan Usaha Tani				16	3.840.728.100	Lain-lain	Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan

Sasaran (Immediate Outcome)	Indikator	Permasalahan	Sasaran dalam mengatasi Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target Tahun 2024	Rencana Aksi	Output		Target				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			Koordinator	Pelaksana
		Harga beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan karena ketersediaan komoditas yang terbatas	Terlaksananya koordinasi kerjasama antar daerah dalam rangka pengendalian inflasi	Kerjasama dengan daerah lain	1 laporan	Koordinasi kerjasama antar daerah dalam rangka pengendalian inflasi	1 kali	Terlaksananya koordinasi kerjasama antar daerah dalam rangka pengendalian inflasi				1		Pengawasan	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Ketua TPID
		Penyebaran sentra produksi hasil pertanian yang belum merata	Terlaksananya revitalisasi pasar tradisional	Peningkatan Infrastruktur Perdagangan melalui Revitalisasi Pasar Tradisional	5 pasar	Revitalisasi pasar tradisional	pasar	Terlaksananya revitalisasi pasar tradisional				5	3.406.573.000	Lain-lain	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Arus distribusi barang kebutuhan pokok dan penting antar wilayah yang kurang lancar sehingga menyebabkan terbatasnya barang kebutuhan pokok dan penting di wilayah tertentu	Terlaksananya pembangunan infrastruktur pedesaan	Pembangunan Infrastruktur pedesaan	49 lokasi	Pembangunan Infrastruktur pedesaan melalui padat karya	lokasi	Terlaksananya pembangunan infrastruktur pedesaan melalui padat karya				49	4.900.000.000	Lain-lain	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Adanya fluktuasi harga bahan pangan strategis dan dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan diperlukan koordinasi dan sinkronisasi untuk merumuskan kebijakan dalam upaya pengendalian inflasi	Terlaksananya koordinasi TPID	Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten	36 kali	Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	kali	Terlaksananya koordinasi TPID Kabupaten	9	9	9	9	168.208.900	Pengawasan	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	TPID Kabupaten
		Adanya ekspektasi masyarakat terhadap inflasi akibat kenaikan harga-harga komoditas tertentu	Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat bersama dengan TPID DIY menjelang HBKN	Mengendalikan Ekspektasi Inflasi	3 kali	Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat bersama dengan TPID DIY menjelang HBKN	kali	Terlaksananya Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat bersama dengan TPID DIY menjelang HBKN		2		1		Pengawasan	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	TPID Kabupaten
		Perlu peningkatan kualitas data karena data sangat penting dalam pengambilan sebuah keputusan	Tersedianya update data informasi komoditas di tingkat produsen dan konsumen	Memperbaiki Kualitas Data	tiap hari kerja	Penyediaan informasi data harga komoditas di tingkat produsen melalui <a href="https://panelharga.b">https://panelharga.b</a>	data	Tersedianya informasi data harga komoditas di tingkat produsen melalui <a href="https://panelharga.b">https://panelharga.b</a>	60	60	60	60		Pengawasan	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

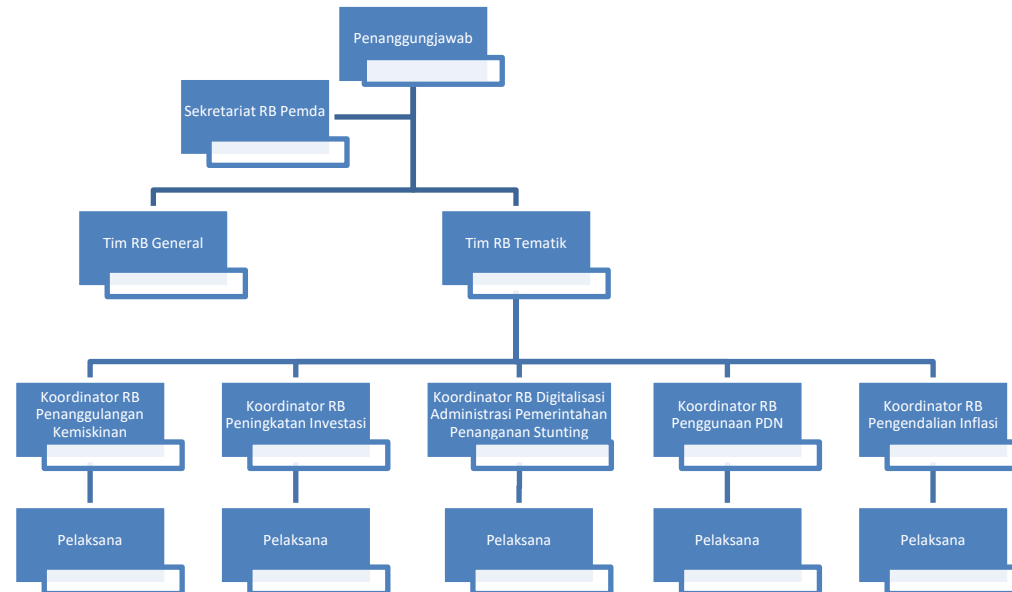


### BAB III

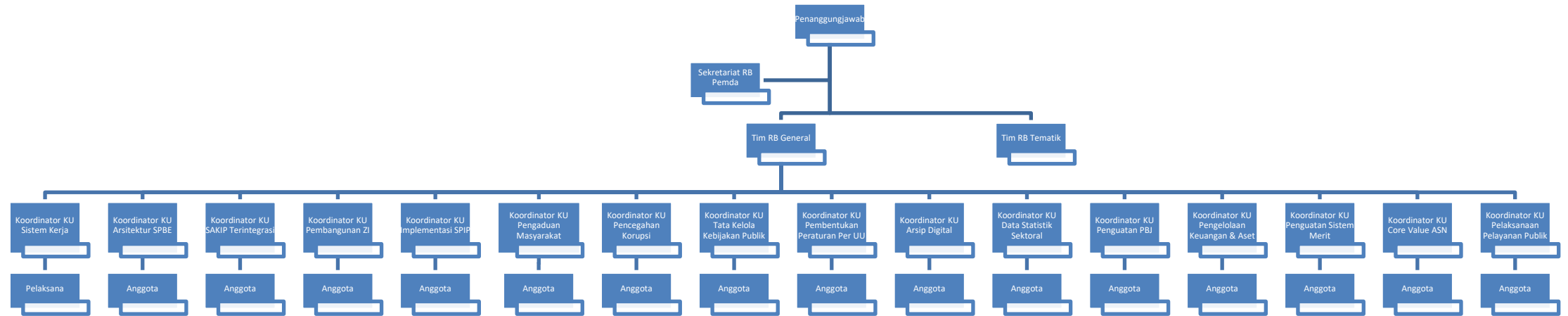
## PELAKSANAAN RENCANA AKSI

Pelaksanaan Rencana Aksi pada RB General dan RB Tematik didasarkan pada perencanaan RB yang telah ditetapkan. Tahapan pelaksanaan merupakan hal strategis yang perlu didukung oleh kolaborasi dan keterlibatan unsur terkait. Penanggungjawab pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo sedangkan pelaksana rencana aksi dilaksanakan oleh Tim RB Pemda. Penetapan Tim RB Pemda ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo. Tim RB Pemda terdiri dari Koordinator Tim di masing-masing unit kerja pengampu sasaran RB General dan RB Tematik serta Sekretariat tim RB Pemda di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka penyiapan kelengkapan administratif pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Masing-masing koordinator Tim di masing-masing unit kerja dapat menetapkan tim RB unit kerja yang terdiri dari sekretariat dan pelaksana yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Adapun tim pengelola RB sebagai berikut :

#### 1. RB Tematik



## 2. RB General



## **BAB IV**

### **MONITORING RENCANA AKSI**

Evaluasi RB dilaksanakan dengan lebih mengukur hasil dan dampak dibandingkan dengan proses, menghilangkan kesan penilaian yang bersifat administratif, harmonisasi, integrasi dan sinergitas indikator penilaian reformasi birokrasi. Evaluasi reformasi birokrasi secara bertahap dilaksanakan melalui evaluasi internal untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan RB berjalan dengan baik dan mampu menjawab permasalahan terkait tata kelola pemerintahan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara komprehensif untuk rencana aksi RB General dan RB Tematik secara berkala. Evaluasi internal dilaksanakan setiap triwulan dan tahunan yang dilakukan oleh evaluator internal. Sedangkan untuk evaluasi eksternal dilaksanakan secara tahunan yang dilaksanakan oleh evaluator meso dan evaluator nasional.

Pelaksana evaluasi internal dilaksanakan oleh evaluator internal merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan RB di instansinya. Evaluasi internal dilaksanakan dalam rangka mengukur progres capaian rencana aksi yang telah ditetapkan secara periodik setiap triwulan dengan berdasarkan bukti dukung yang relevan. Sehingga dapat memberikan saran dan rekomendasi dalam menghadapi kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi. Sedangkan untuk evaluasi internal tahunan mengukur capaian dari target indikator kegiatan utama yang telah ditetapkan dengan keluaran (*output*) Evaluasi Internal RB berupa Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) yang didalamnya berisi catatan dan rekomendasi atas pelaksanaan RB internal. Catatan, saran, dan rekomendasi harus disampaikan secara jelas dan objektif agar hasil evaluasi internal RB dapat dimanfaatkan untuk perbaikan RB internal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi instansi. Pelaksanaan rencana aksi dilaksanakan secara komprehensif yang membutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran untuk berubah (*commitment to change*) dalam mencapai tujuan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh. Komitmen yang kuat ditandai munculnya keterlibatan aktif dari pimpinan maupun seluruh jajaran, sehingga ide dan inovatif akan lebih mudah muncul. Kolaborasi diperlukan untuk mempercepat tercapainya tujuan RB, baik kolaborasi internal, lintas unit kerja, maupun dengan *stakeholders* terkait.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu untuk menyelesaikan akar masalah sehingga tidak hanya fokus pada permasalahan yang terjadi, namun mengetahui dengan jelas penyebab yang signifikan untuk diintervensi sesuai Rencana Aksi yang telah disusun. Komitmen untuk berorientasi pada hasil dan fokus pada akar masalah, inovatif dan terbuka atas ide baru, pengalaman dan pengetahuan, adaptif dan memanfaatkan teknologi, mengedepankan *public value*, serta kolaboratif dan partisipatif merupakan upaya dalam optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

---

Wates, 13 Juni 2024  
Pj. BUPATI KULON PROGO,  
ssa  
Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI